

Tinjauan Konstruktivisme dan Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Uni Eropa

Hartanto

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Respati Yogyakarta;
tanto0072000@gmail.com

Diterima: 21 Desember 2020 Disetujui: 29 Januari 2021 Dipublikasikan: 1 Februari
2021

Abstract: *This paper tries to review and compare the perspective of constructivism and Ashabiyah. The discussion of this paper includes an explanation of the concepts of constructivism and Ibn Khaldun's asabiyah, the two concepts will also be explained in the case study of the European Union, from the case study it will be seen how the two perspectives have some of the same characters but some are different. Constructivism and Asabiyah in the context of European integration both have unifying factors, but these factors are different if constructivism is an interest in Ashabiyah the factor is a cultural project. Constructivism and asabiyah both lead to a common interest in realizing a social order or political institution, what is different is if in constructivism the actor tries to form an identity that shapes interests by creating a political institution, while according to Asabiyah the actor forms a social solidarity and brotherhood to realize a political institution that accommodates interests. So constructivists emphasize the formation of new identities by actors on the basis of common interests, whereas in Asabiyah there is no emphasis on identity but on making cultural projects that can be accepted by all political institutions.*

Keywords: *Constructivism, Ashabiyah, European Union*

Abstrak: *Paper ini mencoba mereview dan membandingkan perspektif konstruktivisme dan Asabiyah. Pembahasan paper ini meliputi penjelasan tentang konsep konstruktivisme dan asabiyyah Ibnu Khaldun, akan dijelaskan pula dua konsep tersebut dalam studi kasus Uni Eropa, dari studi kasus tersebut akan terlihat bagaimana kedua perspektif tersebut mempunyai beberapa karakter yang sama tetapi ada juga yang berbeda. konstruktivisme dan asabiyyah dalam konteks integrasi Eropa sama-sama mempunyai faktor yang bersifat pemersatu, tetapi faktor tersebut berbeda jika pada konstruktivisme berupa kepentingan pada Ashabiyah faktornya adalah cultural project. Konstruktivisme dan asabiyyah sama-sama mengarah pada sebuah kepentingan bersama dalam mewujudkan sebuah tatanan sosial atau institusi politik, yang berbeda adalah jika pada konstruktivisme aktor berusaha membentuk identitas yang membentuk kepentingan dengan membuat sebuah institusi politik maka asabiyyah aktor membentuk sebuah solidaritas sosial dan persaudaraan untuk mewujudkan sebuah institusi politik yang mengakomodasi kepentingan. Jadi konstruktivis menekankan pada pembentukan identitas baru oleh aktor atas dasar kepentingan yang sama sedangkan dalam asabiyyah tidak ada penekanan pada identitas tetapi pada pembuatan cultural project yang bisa diterima oleh semua institusi politik.*

Kata Kunci: *Konstruktivism, Ashabiyah, Uni Eropa*

Pendahuluan

Konstruktivisme melihat dunia sebagai sebuah proses bukan sesuatu yang sudah ada atau dengan kata lain "becoming" dan bukannya "being". Tidak seperti idealisme dan pasca strukturalisme serta postmodernisme yang memahami dunia hanya karena dunia dapat dibayangkan atau diperbincangkan, konstruktivisme menerima bahwa tidak semua pernyataan memiliki nilai pengetahuan yang sama dan sebagai konsekuensinya ada semacam pondasi bagi pengetahuan¹. Sedangkan konsep "ashabiyah" merupakan salah satu bukti kejelian dan kecerdasan Ibnu Khaldun dalam menganalisis persoalan politik dan Negara. "Ashabiyah" merupakan kunci lahir dan terbentuknya sebuah Negara. Jika aspek "ashabiyah" suatu Negara sudah melemah, maka Negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Alhasil, sampai sekarang tesis tersebut masih terbukti benar, dan bahkan teori "ashabiyah" ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer².

Uni Eropa (UE) merupakan sebuah entitas organisasi regional yang dianggap paling maju saat ini. Bahkan Krasner³, seorang realis yang sangat percaya bahwa negara berdaulat saat ini masih sedominan di masa lalu, mengakui bahwa Uni Eropa adalah sesuatu yang berbeda. Uni Eropa adalah entitas yang unik dan bukanlah model yang bisa ditiru oleh belahan dunia lain dari sisi wilayah, pengakuan, kontrol, otoritas nasional, otoritas ekstra-nasional, dan otoritas supra nasional. Oleh karena itu dalam artikel ini pun penulis mencoba untuk menganalisa fenomena Uni Eropa dari sudut pandang ilmu hubungan internasional, khususnya perspektif konstruktivisme dari Barat dan Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun dari Timur.

Konstruktivisme

Gagasan utama konstruktivisme adalah: *pertama*, struktur merupakan pembentuk perilaku aktor sosial dan politik. Individu atau negara tidak hanya memiliki aspek material, akan tetapi ada aspek normatif dan ideasional. Kepentingan inilah yang dikembangkan oleh aktor-aktor politik tersebut. *Kedua*, antara struktur dan agen terdapat hubungan untuk menentukan satu dengan yang lain. Terdapat hubungan yang resiprokal antara aktor dengan struktur dimana struktur dipengaruhi oleh aktor, dan sebaliknya. *Ketiga*, kepentingan merupakan wujud dari identitas aktor politik. Ada tiga varian konstruktivisme yang masing-masing dikemukakan oleh Alexander Wendt, Friedrich Kratochwil, dan Nicholas Greenwood Onuf⁴.

Wendt's constructivism, mengemukakan bahwa cara politik internasional adalah tingkah laku yang diciptakan, bukan *given*, karena identitas-identitas dan kepentingan-kepentingan diciptakan dan didukung oleh *intersubjective practice*. Menurut Went,

¹Price, Richard, and Christian Reus-Smit. "Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism." *European Journal of International Relations* Vol. 4. No. 3, 1998, h. 263.

²Ilham, Muh. "Konsep "Ashabiyah" dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun." *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4. No. 1. 2016, h. 2.

³Stephen, Krasner. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1999, h. 235.

⁴Jackson, Richard, Georg Sørensen, and Jørgen Møller. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press, USA, 2019, h. 206.

perilaku lebih dipengaruhi oleh *intersubjective* daripada *material structure*. Went menekankan bahwa anarki merupakan salah satu bentuk produk negara. Hal ini diterangkan dengan jelas oleh Went melalui salah satu tulisannya yakni '*Anarchy is What States Make of It*'⁵. *Kratochwil's constructivism*, yang mengkritik pemikiran teori Hubungan Internasional yang merupakan sebuah konsep politik dan perilaku manusia yang sempit. Kratochwil berusaha untuk memperkenalkan kembali dimensi politik kepada kepercayaan hubungan internasional dalam memahami aksi politik secara utuh daripada instrumen saja. Kratochwil melihat ini berdasarkan media aturan-aturan dan norma-norma. Bentuk konstruktivisme ini lebih kepada usaha untuk melihat pengaruh norma sosial yang legal oleh identitas⁶. *Onuf's constructivism*, Garis focus konstruktivisme Onuf berdasarkan pada sebuah penjelajahan aturan-aturan. Diawali dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan kata lain, hubungan sosial membuat dan menciptakan manusia pada bentuk yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa konstruktivisme berdasarkan dugaan bahwa masyarakat satu dengan yang lain menjalani proses dua cara. Inti pemikiran Onuf adalah area dimana adanya pertemuan antara hubungan internasional dan hukum internasional. Menurut Onuf, makna hubungan sosial manusia tergantung pada eksistensi aturan-aturan (*rules*). Aturan itu adalah *statement* yang mengatakan apa yang seharusnya dilakukan *people*⁷.

Munculnya konstruktivisme memberikan kontribusi beberapa penting dalam dunia hubungan internasional, yakni: *pertama*, bertambahnya materi cara pandang dalam menganalisa suatu fenomena dalam hubungan internasional kaitannya dengan teori perspektif. Sehingga fenomena di dunia internasional dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang. *Kedua*, munculnya konstruktivisme juga sebagai pencetus sebuah pembaharuan kepentingan dalam teori internasional. *Ketiga*, konstruktivisme membawa sebuah level konseptual dan pengalaman baru dalam menganalisa internasional dan masyarakat dunia.

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh konstruktivisme yang dapat dikritisi, antara lain: *Pertama*, tidak adanya kesepakatan antara penganut konstruktivis itu sendiri tentang sifat dasar konstruktivisme, sehingga terdapat perbedaan pandangan antara kaum konstruktivis satu dengan yang lain. *Kedua*, belum ada kepentingan ketika konstruktivisme terjun ke masyarakat, akan tetapi nilai-nilai dalam masyarakatlah yang menentukan kepentingan itu seperti interaksi, kultur, dan komunikasi. *Ketiga*, adanya pandangan bahwa konstruktivisme muncul untuk melengkapi keberadaan realis, dan menjadi sub ordinat dari realis. *Keempat*, menurut teori kritis, pandangan konstruktivis dianggap berusaha untuk menghilangkan aspek power dalam memahami nilai. Konstruktivisme tidak memandang hubungan antar nilai sebagai sebuah proses politik yang mempengaruhi aspek-aspek tertentu seperti keadilan.⁸

⁵Wendt, Alexander. "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics". *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), h. 394

⁶Della Porta, Donatella, and Michael Keating, eds. *Approaches and Methodologies in The Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, h. 87.

⁷Kubalkova, Vendulka, Nicholas Onuf, and Paul Kowert. "Constructing Constructivism." dalam *International Relations in a Constructed World*. London: Routledge, 2015, hal. 14

⁸Christian Reus-Smith, "Constructivism" dalam Scot Burchill, Richard Devetak, (et all), *Theories of International Relations, Second Edition*, London: Palgrave, Cet. I, 2001.

Assabiyah Ibnu Khaldun

Umat manusia secara alamiah adalah kelompok sosial dan cenderung untuk hidup bersama. Ini dikarenakan, kapasitas individu yang tidak memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan untuk mempertahankan diri. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain. Tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerjasama dalam suasana konflik, permusuhan ('udwan), dan ketidakadilan (zalim). Hal-hal tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak mungkin diwujudkan. Untuk itulah diperlukan solidaritas sosial (Solidaritas sosial itu berasal dari ikatan darah atau ikatan lain yang memiliki fungsi yang sama) yang akhirnya membentuk 'asabiyyah (*group feeling*) dan wazi' (kekuatan pengendalian atau pemerintah) untuk mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga kebersamaan masyarakat⁹. Hal inilah yang saat ini ingin dan mungkin telah terwujud pada integrasi Eropa.

Secara bahasa terminologi 'asabiyyah digunakan di Arab dalam dua pengertian. Yang pertama berkonotasi positif dengan konsep persaudaraan (brotherhood) dalam Islam. Inilah yang membuat masyarakat (N) bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengekang kepentingan pribadi (self-interest) dan memenuhi kewajiban kepada sesama, dengan demikian persaudaraan mendorong keselarasan sosial dan menjadi kekuatan penentu dalam kebangkitan dan kemajuan suatu peradaban. Dalam pengertian persaudaraan, 'Ashabiyah dipuji dan dianjurkan oleh Syari'ah (S). Pengertian lain 'asabiyyah digunakan untuk merujuk pada kesetiaan buta pada kelompok sendiri. Hal ini membawa kecintaan pada kelompok sendiri tanpa memperdulikan benar salah, mendorong terjadinya ketimpangan, kebencian dan konflik. Konotasi negatif ini tidak sesuai dengan Syari'ah dan dikutuk oleh Rasulullah saw. Dua konotasi tersebut terdapat dalam Al-Qur'an 5:2 "Dan bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ibnu Khaldun menggunakan terminologi 'asabiyyah dalam pengertian pertama.¹⁰

Studi Kasus Integrasi Eropa

Gagasan integrasi Eropa tidak lepas dari berakhirnya Perang Dunia II yang ternyata tidak serta-merta mewujudkan perasaan aman di hati masyarakat Eropa. Ancaman akan terjadinya Perang Dunia III antara pihak Barat dan Timur berkembang demikian cepat, terlihat dengan buntutnya Konferensi Moskow tanggal 24 April 1947 mengenai isu Jerman. Kebuntuan ini makin meyakinkan Barat bahwa Uni Soviet, sekutu saat bertempur melawan Nazi Jerman, akan menjadi sumber ancaman seketika terhadap demokrasi Barat. Blokade kota Berlin oleh pihak Soviet pada Juni 1948 membagi negara tersebut menjadi dua negara, yang kemudian makin meningkatkan ketegangan di antara dua blok tersebut. AS berkepentingan menarik Jerman (Barat) ke dalam suatu persekutuan negara-negara Eropa Barat agar dapat menghadapi ancaman Blok Timur. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan menyingkirkan rivalitas lama antara Prancis dan Jerman. Karena itu, AS melancarkan strategi meminta Prancis melakukan pendekatan

⁹ Khaldun, Ibn, *Muqddimah*, terj. Ahmadie Toha. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, h. 151.

¹⁰ Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: An Introduction to History*, London: Routledge dan Kegan Paul, 1967, Chapter 2.

kepada pihak Jerman (Barat). Musim semi 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman, dipercaya AS dan Inggris untuk menjalankan misi penting: membawa Republik Federal Jerman (RFJ) kembali ke persekutuan Blok Barat. Menlu Schuman bekerjasama dengan Jean Monnet, seorang pejabat tinggi Prancis. Monnet lalu menyusun satu deklarasi yang kemudian disepakati Jerman dan Prancis pada 9 Mei 1950, yang dapat dianggap sebagai landasan awal bagi Federasi Eropa¹¹.

Deklarasi tersebut, antara lain berisi penghilangan rivalitas di antara Jerman dan Prancis, serta melakukan terobosan kerjasama di bidang baja dan batubara (ECSC) atau Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (MEE) dan Masyarakat Energi Atom Eropa (EURATOM) yang dianggap lebih mudah untuk diwujudkan.¹² Eropa yang terintegrasi mempertegas identitas tertentu. Fakta-fakta menunjukkan bahwa komunitas Eropa terdiri dari kultur yang berbeda, sehingga awalnya menyulitkan integrasi seperti perbedaan Inggris dan Irlandia, Skotlandia atau Wales. Selain itu, pandangan masyarakat yang kuat atas integrasi komunitas Eropa ketika proses relasi itu berlangsung *face to face*.¹³ Perjanjian Maastricht (Maastricht Treaty) tahun 1992 merupakan sebuah langkah yang lebih besar, yang secara resmi membentuk Uni Eropa. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi kawasan dimana negara-negara anggotanya menyerahkan sebagian kedaulatannya¹⁴.

Metode

Penulis menggunakan metode Penulisan kualitatif. Metode Penulisan kualitatif menampilkan bentuk pengumpulan dan analisis data yang memiliki fokus pada penekanan dan pemahaman makna. Data yang dikumpulkan berasal dari buku, jurnal ilmiah serta dokumen resmi yang mendukung. Penulis dalam metode ini membuat interpretasi dari apa yang di baca, dengar, dan pahami¹⁵.

Integrasi Eropa ditinjau dengan Perspektif Konstruktivisme.

Integrasi Eropa (IE) dalam konteks konstruktivisme adalah sebuah kesadaran atas bagaimana konstruksi sosial Eropa dilakukan. IE adalah bentuk dari konstruksi norma, gagasan dan kolektivitas identitas yang dianggap sangat penting dalam perspektif politik maupun tataran praktis. Dengan kata lain bagaimana seharusnya masyarakat Eropa memandang identitasnya dan selanjutnya mengkonstruksi realitas sosial tersebut menjadi identitas sosial. Konstruktivisme bertolak dari tiga proposisi utama, yakni aktor sebagai pembentuk struktur sosial dan politik (aktor bukan struktur yang berperan), kepentingan sebagai produk dari identitas aktor serta struktur dan agen saling menentukan satu sama lain. Bangunan ini mengusung setting historis sebagai aspek penting pemaknaan, maka berangkat dari itu sejarah pembentukan dan konteks politik internasional menjadi standing point guna memandang integrasi Eropa dengan kaca mata konstruktivisme.

¹¹ McCauliff, C. M. A. "Union in Europe: Constitutional Philosophy and the Schuman Declaration, May 9, 1950." *Colum. J. Eur. L.* 18, 2011, hal. 441.

¹² Ibid

¹³ Rob Sibley. *Eropa sebagai kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan tantangan Masa Depan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 4.

¹⁴ The Economist, August 26, 2006

¹⁵ Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. *An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed methods 2nd Edition*. California: Sage Publications Inc, 2017, h. 141.

Integrasi Eropa menurut perspektif konstruktivisme dipengaruhi oleh intersubyektifitas komunitas dan kolektivitas makna yaitu kultur dan daya tarik sejarah oleh aktor-aktor politik. Antara sejarah dan aktor melahirkan identitas yang secara terus menerus berhubungan dalam norma dan aturan yang disepakati. Identitas aktor, yakni negara-negara Eropa menyediakan dasar-dasar kepentingannya berupa kerja sama yang telah dimulai sejak dicetuskan *The Treaty of Rome* oleh enam negara Belgia, Belanda, Luxemburg, Perancis, Jerman dan Italia pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatangan ECSC Treaty bersidang di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani European Atomic Energy Community (EAEC), namun lebih dikenal dengan Euratom dan European Economic Community (EEC). Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan Euratom merupakan traktat yang spesifik, detail dan rigid law treaties, maka EEC Treaty lebih merupakan sebuah framework treaty. Tujuan utama EEC Treaty adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui: Pencapaian suatu *Custom Unions* yang di satu sisi melibatkan penghapusan *customs duties, import quotas* dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu *Common Customs Tariff* (CCT) vis-à-vis negara ketiga (non anggota). Implementasi, inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, *freedom of movement* - barang, jasa, pekerja dan modal¹⁶.

Bagi perspektif konstruktivis, integrasi ini merupakan akumulasi dan arus balik dari terdefinisiannya situasi dunia yang anarki yang turut menjelaskan peran identitas aktor negara. Masyarakat Eropa dibangun dan ditegakkan dalam interaksi sosial yang lainnya semata. Maka identitas masyarakat Eropa secara sosial menentukan lingkungan anarki atau keamanan. Integrasi juga merupakan bagian dari cita-cita *founding father* Eropa atas kesepakatan pada format identitas yang kolektif, dimana identitas Eropa tersebut secara kolektif tergantung pada bagaimana kepentingan politik dan ekonomi itu didefinisikan.

Kerja sama antar negara Eropa mulai diupayakan pada tahun 1991 dengan adanya *The Maastricht Treaty* sampai dengan Konvensi Masa Depan Eropa dan Traktat Akses 10 Negara Anggota Baru. Berbagai traktat UE tersebut mungkin akan segera mengalami perubahan, sebagai hasil dari Konvensi mengenai Masa Depan UE dan Traktat Akses 10 negara anggota baru yang ditandatangani tanggal 16 April 2003 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Mei 2004. Sementara ini beberapa pembahasan utama adalah di bidang:

1. Penyederhanaan traktat-traktat UE kedalam satu Traktat, dengan penyajian yang lebih jelas dan lebih mudah dimengerti.
2. Demarkasi kewenangan (who does what in the EU, wewenang UE, wewenang negara anggota, dll).
3. Peran Parlemen negara-negara anggota dalam struktur UE.
4. Status Charter of Fundamental Rights yang diproklamirkan di Nice.¹⁷

Identitas kolektif Eropa menekankan aspek-aspek yang bertujuan positif, melibatkan seluruh anggota dalam peningkatan kesejahteraan sebagai perhatian utama. Masing-masing negara sebagai aktor yang memiliki identitas kolektif menggambarkan

¹⁶ Urwin, Derek W. *The Community of Europe: A history of European Integration Since 1945*. London: Routledge, 2014, hal. 5.

¹⁷ Ibid, hal 7.

kepentingannya atas sebuah level agregasi yang lebih tinggi yang berdasarkan pada perasaan-perasaan atas solidaritas, komunitas dan loyalitas. Integrasi tersebut tidak berarti bahwa seluruh kepentingan masing-masing aktor (negara) diabaikan, melainkan, meminjam Wendt, akan ditempatkan kembali dalam satu kolektivitas sehingga dapat mengubah identitas aktor dari struktur yang dihasilkan. Wendt melihat bahwa pemahaman atas identitas suatu aktor tetap memfokuskan atas hubungan antara “apa yang dilakukan oleh para aktor” dan “siapa mereka”. Identitas kepentingan pribadi terletak pada jantung “self help” dan perubahan identitas.¹⁸ Pada konteks ini, salah satu alasan mengapa perlu adanya integrasi Eropa adalah adanya identitas kepentingan atas dinamika politik, ekonomi, budaya dan keamanan internasional.

Identitas intersubjektif mempengaruhi distribusi struktur komunitas Eropa. Masing-masing negara memiliki nilai, institusi budaya, tradisi dan diskursus yang pada awalnya berbeda. Namun ketika interaksi sosial berupa integrasi Eropa dilakukan dalam berbagai tahapan-tahapan kerjasama, integrasi dan pembentukan institusi akan menimbulkan interpretasi secara intersubjektif. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh masing-masing komunitas dalam integrasi Eropa didasarkan atas pemahaman norma intersubjektif. Integrasi Eropa disertai juga usaha untuk menafsirkan dan membangun keselarasan antara hukum domestik agar sesuai dengan kerangka hukum bersama yang dirumuskan di Kopenhagen.

Pasca perang dingin dunia bergerak di rel unipolar dengan Amerika sebagai masinisnya. Kondisi ini membuat Integrasi Eropa kembali mereposisi tujuan dan fungsinya. Integrasi Eropa tidak lagi bercita-cita sebagai kekuatan penyeimbang dan oleh karenanya menyatukan kekuatan ekonomi, melainkan berambisi menjadi the next super state guna menandingi hegemoni Amerika. Kerjasama ekonomi hanyalah kamufase yang diusung untuk membungkus tujuan yang sebenarnya kepada penyatuan politik. Asumsinya adalah bahwa keberhasilan dalam kerja sama ekonomi pada akhirnya akan dapat memfasilitasi integrasi ekonomi dan integrasi politik menjadi lebih besar. Ketika negara-negara anggota memiliki komitmen untuk memberikan kebebasan bagi pekerja untuk melintasi batas-batas negara misalnya, tetapi karena perbedaan peraturan nasional mengenai sertifikasi, akan menghambat mereka untuk bekerja di negara lain. Karena itu, guna menghindari terjadinya pembatasan pergerakan pekerja dari suatu negara ke negara lain, negara-negara anggota harus membuat kebijakan bersama dalam bidang pendidikan. Ini tentu saja memerlukan kebijakan politik masing-masing negara anggota. Artinya bahwa pembentukan kerja sama unit ekonomi akan mendorong kerja sama pada unit politik, dan penyatuan unsur-unsur perekonomian sesungguhnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan politik.

Pada sisi lain, integrasi Eropa sebagai pengejawantahan kepentingan para aktor dengan mengusung ide sense of identity. Kesamaan identitas dan karenanya harus berintegrasi lalu menjadi ide yang diamini tidak hanya kalangan elit tapi juga nongovernmental groups atau kelompok-kelompok transnasional di tingkat regional, baik secara formal maupun informal. Penguatan isu integrasi identitas kawasan bahkan mempengaruhi kondisi suksepsi negara anggota UE. Pada titik ini, struktur (UE) dan agen (aktor-aktor) saling menentukan satu sama lain dalam pewujudan kepentingan masing-masing. Bukti

¹⁸ Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*, cetakan ke-2. Cambridge University Press. 2001, hal. 47.

perkembangan Uni Eropa menunjukkan bahwa sistem nilai dan gagasan bersama memiliki karakteristik struktural dan menentukan tindakan sosial dan politik. Kebijakan penyatuan mata uang (euro) menjadi bukti bahwa kepentingan Uni Eropa bukanlah rangkaian preferensi yang baku melainkan produk dari identitas aktor-aktor Uni Eropa, *identities are basis of interest*.

Integrasi Eropa ditinjau dengan Perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun.

Umat manusia secara alamiah adalah kelompok sosial dan cenderung untuk hidup bersama. Ini dikarenakan, kapasitas individu yang tidak memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan untuk mempertahankan diri. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain. Tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerjasama dalam suasana konflik, permusuhan ('udwan), dan ketidakadilan (zalim). Hal-hal tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak mungkin diwujudkan. Untuk itulah diperlukan solidaritas sosial yang akhirnya membentuk 'asabiyyah (*group feeling*) dan wazi' (kekuatan pengendalian atau pemerintah) untuk mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga kebersamaan masyarakat. Hal inilah yang saat ini ingin dan mungkin telah terwujud pada integrasi Eropa. Dimana negara-negara eropa melakukan integrasi atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ekonomi dengan penetapan Euro sebagai mata uang tunggal Eropa dan melakukan kerja sama pertahanan.

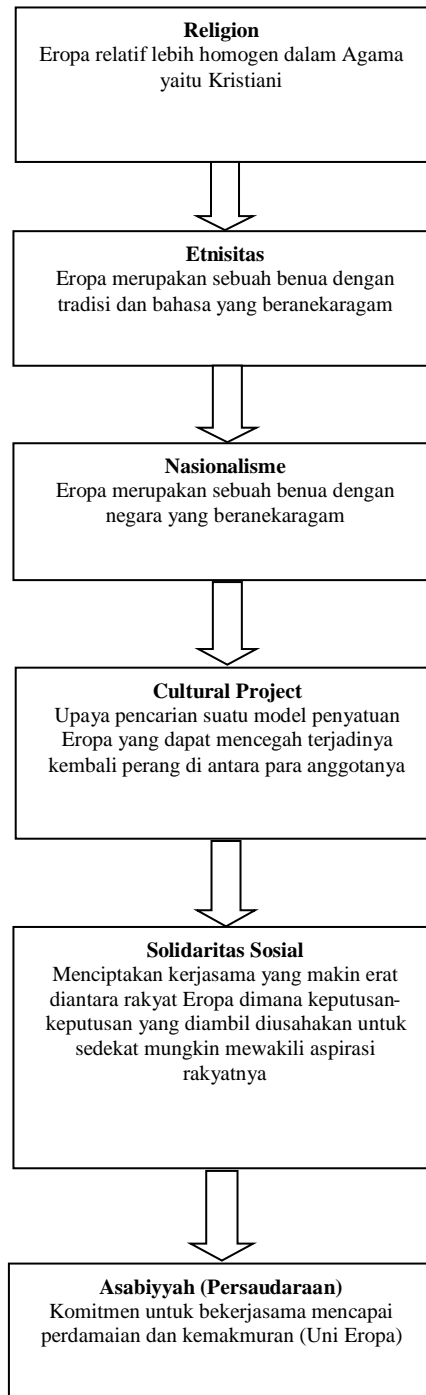
Secara bahasa terminologi 'asabiyyah digunakan di Arab dalam dua pengertian. Yang pertama berkonotasi positif dengan konsep persaudaraan (brotherhood) dalam Islam. Inilah yang membuat masyarakat (N) bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengekang kepentingan pribadi (self-interest) dan memenuhi kewajiban kepada sesama, dengan demikian persaudaraan mendorong keselarasan sosial dan menjadi kekuatan penentu dalam kebangkitan dan kemajuan suatu peradaban. Dalam pengertian persaudaraan, 'Ashabiyah dipuji dan dianjurkan oleh Syari'ah (S). Pengertian lain 'asabiyyah digunakan untuk merujuk pada kesetiaan buta pada kelompok sendiri. Hal ini membawa kecintaan pada kelompok sendiri tanpa memperdulikan benar salah, mendorong terjadinya ketimpangan, kebencian dan konflik. Konotasi negatif ini tidak sesuai dengan Syari'ah dan dikutuk oleh Rasulullah saw. Dua konotasi tersebut terdapat dalam Al-Qur'an 5:2 "Dan bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ibnu Khaldun menggunakan terminologi 'asabiyyah dalam pengertian pertama. Terminologi 'asabiyyah dalam pengertian pertama ada pada Integrasi Eropa dimana kerja sama dalam masyarakat Eropa merupakan hasil dari adanya *group feeling* yang ditunjukkan dengan adanya berbagai kesepakatan dimulai dari The Treaty of Paris (ECSC) pada tahun 1952 sampai pada Konvensi mengenai Masa Depan UE dan Traktat Akses 10 negara anggota baru yang ditandatangani tanggal 16 April 2003 dan mulai berlaku 1 Mei 2004. *Group feeling* pada Integrasi masyarakat Eropa secara historis nampak apabila ada ancaman terhadap Eropa secara keseluruhan, terutama sekali apabila ancaman tersebut berasal dari luar. Pada zaman pertengahan Islamlah solidaritas sosial yang menimbulkan *group feeling* pada masyarakat Eropa dalam menghadapi Perang Salib. Kemudian *group feeling* itu muncul kembali dari pembentukan Coal and Steel Community pada tahun 1952 dan pembentukan traktat lanjutan setelah traktat tersebut seperti telah dikemukakan pada konsep integrasi Eropa dimuka.

Asabiyyah itu sendiri bergantung pada sejumlah variabel yang sudah dimasukkan Ibnu Khaldun dalam analisisnya tentang hubungan sebab-akibat sirkular. 'Ashabiyyah berkembang dan menjadi kuat jika terdapat keadilan (justice) untuk memastikan kesejahteraan (well-being) tercukupi untuk semua masyarakat melalui pemenuhan kewajiban mutual dan pembagian hasil pembangunan yang setara (Wealth dan government). Ketiadaan keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, menyakiti masyarakat dan membawa pengaruh negatif terhadap solidaritas. Hal tersebut pada gilirannya tidak saja berpengaruh buruk terhadap motivasi kerja melainkan juga melemahkan efisiensi, inovasi, entrepreneurship, dan kualitas positif lain dalam masyarakat, dan tentu menjadi pendorong distintegrasi dan kemunduran masyarakat. Dalam konteks integrasi Eropa yang menekankan pada aspek-aspek yang bertujuan positif, melibatkan seluruh anggota dalam peningkatan kesejahteraan sebagai perhatian utama. Pada konteks ini, salah satu alasan mengapa perlu adanya integrasi Eropa adalah adanya usaha untuk mengembangkan iklim yang kondusif dalam konteks politik, ekonomi, budaya dan keamanan internasional.

Tanpa keberadaan keadilan, maka tidak akan ada 'asabiyyah, tanpa adanya 'asabiyyah maka tidak terjadi lingkungan yang tepat untuk implementasi Shari'ah, sehingga tidak terdapat penegakan keadilan, pembangunan dan kesejahteraan. Ketiadaan 'asabiyyah, penegakan keadilan, pembangunan dan kesejahteraan pada gilirannya akan membuat otoritas politik (G) lemah dan tidak efektif. Kesemuanya direfleksikan dalam pelemahan semua variabel-variabel utama sosial ekonomi yang akan membawa pada kerusakan dan kehancuran peradaban. Integrasi Eropa yang diwujudkan dengan Uni Eropa merupakan sebuah institusi politik yang terdiri dari 27 negara, Badan ini memiliki 4 institusi utama: Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa dan Komisi Eropa. Tiap institusi memiliki Presiden sendiri, dan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Uni Eropa dibentuk atas upaya pencarian suatu model penyatuan Eropa yang dapat mencegah terjadinya kembali perang di antara para anggotanya. Perang di antara negara-negara Uni Eropa sekarang tampaknya merupakan hal yang mustahil setelah lebih dari 50 tahun membangun persatuan. Uni Eropa lebih terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di negara-negara tetangga dan bagian dunia lainnya. Uni Eropa merupakan donor bantuan keuangan terbesar di dunia untuk negara-negara yang mengalami masalah.

Hal ini sesuai dengan pandangan Ibnu Khaldun dimana institusi politik tidak hanya negara, institusi politik terbentuk dari perkembangan sosial disekitarnya. Jika dibuat sebuah siklus tentang perkembangan sosial (*identity formation*) Integrasi Eropa dapat dilihat sebagai berikut :

Perkembangan Sosial Integrasi Eropa Menurut Ashabiyah



Sumber: Olahan Penulis

Kesimpulan

Gagasan utama konstruktivisme adalah: *pertama*, struktur merupakan pembentuk perilaku aktor sosial dan politik. Individu atau negara tidak hanya memiliki aspek material, akan tetapi ada aspek normatif dan ideasional. Kepentingan inilah yang dikembangkan oleh aktor-aktor politik tersebut. *Kedua*, antara struktur dan agen terdapat hubungan untuk menentukan satu dengan yang lain. Terdapat hubungan yang resiprokal antara aktor dengan struktur dimana struktur dipengaruhi oleh aktor, dan sebaliknya. *Ketiga*, kepentingan merupakan wujud dari identitas aktor politik. Jika dibandingkan dengan konsep *asabiyyah* Ibnu Khaldun, secara bahasa terminologi 'asabiyyah digunakan di Arab dalam dua pengertian. Yang pertama berkonotasi positif dengan konsep persaudaraan (*brotherhood*) dalam Islam. Inilah yang membuat masyarakat (N) bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengekang kepentingan pribadi (*self-interest*) dan memenuhi kewajiban kepada sesama, dengan demikian persaudaraan mendorong keselarasan sosial dan menjadi kekuatan penentu dalam kebangkitan dan kemajuan suatu peradaban. Dalam pengertian persaudaraan, 'Ashabiyah dipuji dan dianjurkan oleh Syari'ah (S). Pengertian lain 'asabiyyah digunakan untuk merujuk pada kesetiaan buta pada kelompok sendiri. Hal ini membawa kecintaan pada kelompok sendiri tanpa memperdulikan benar salah, mendorong terjadinya ketimpangan, kebencian dan konflik. Konotasi negatif ini tidak sesuai dengan Syari'ah dan dikutuk oleh Rasulullah saw. Dua konotasi tersebut terdapat dalam Al-Qur'an 5:2 "Dan bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ibnu Khaldun menggunakan terminologi 'asabiyyah dalam pengertian pertama.

Kepentingan dalam konstruktivisme menjadi sebuah faktor pemersatu dalam integrasi Eropa, menurut Ibnu Khaldun yang menjadi faktor pemersatu adalah solidaritas sosial yang didasarkan atas pada *cultural project*, dalam konteks integrasi Eropa *cultural project* seperti dijelaskan pada skema diatas adalah sebuah upaya pencarian suatu model penyatuan Eropa yang dapat mencegah terjadinya kembali perang di antara para anggotanya yang kemudian berkembang menjadi sebuah *asabiyyah* Komitmen untuk bekerjasama mencapai perdamaian dan kemakmuran (Uni Eropa). Jadi bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa konstruktivisme dan *asabiyyah* dalam konteks integrasi Eropa sama-sama mempunyai faktor yang bersifat pemersatu, tetapi faktor tersebut berbeda jika pada konstruktivisme berupa kepentingan pada Ashabiyah faktornya adalah *cultural project*. Konstruktivisme dan *asabiyyah* sama-sama mengarah pada sebuah kepentingan bersama dalam mewujudkan sebuah tatanan sosial atau institusi politik, yang berbeda adalah jika pada konstruktivisme aktor berusaha membentuk identitas yang membentuk kepentingan dengan membuat sebuah institusi politik maka *asabiyyah* aktor membentuk sebuah solidaritas sosial dan persaudaraan untuk mewujudkan sebuah institusi politik yang mengakomodasi kepentingan. Jadi konstruktivis menekankan pada pembentukan identitas baru oleh aktor atas dasar kepentingan yang sama sedangkan dalam *asabiyyah* tidak ada penekanan pada identitas tetapi pada pembuatan *cultural project* yang bisa diterima oleh semua institusi politik.

Daftar Pustaka

- Christian Reus-Smith, "Constructivism" dalam Scot Burchill, Richard Devetak, (et all), *Theories of International Relations, Second Edition*, London: Palgrave, Cet. I, 2001.
- Della Porta, Donatella, and Michael Keating, eds. *Approaches and Methodologies in The Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, h. 87.
- Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. *An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed methods 2nd Edition*. California: Sage Publications Inc, 2017, h. 141.
- Ilham, Muh. "Konsep "Ashabiyah" dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun." *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4. No. 1. 2016, h. 2.
- Jackson, Richard, Georg Sørensen, and Jørgen Møller. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press, USA, 2019, h. 206.
- Khaldun, Ibn, *Muqddimah*, terj. Ahmadie Toha. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, h. 151.
- Khaldun, Ibn. *The Muqaddimah: An Introduction to History*, London: Routledge dan Kegan Paul, 1967, Chapter 2.
- Kubalkova, Vendulka, Nicholas Onuf, and Paul Kowert. "Constructing Constructivism." dalam *International Relations in a Constructed World*. London: Routledge, 2015, hal. 14
- McCauliff, C. M. A. "Union in Europe: Constitutional Philosophy and the Schuman Declaration, May 9, 1950." *Colum. J. Eur. L.* 18, 2011, hal. 441.
- Price, Richard, and Christian Reus-Smit. "Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism." *European Journal of International Relations* Vol. 4. No. 3, 1998, h. 263.
- Rob Sibley. *Eropa sebagai kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan tantangan Masa Depan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 4.
- Stephen, Krasner. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1999, h. 235.
- The Economist, August 26, 2006
- Urwin, Derek W. *The Community of Europe: A history of European Integration Since 1945*. London: Routledge, 2014, hal. 5.
- Wendt, Alexander. "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics". *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), h. 394
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics, cetakan ke-2*. Cambridge University Press. 2001, hal. 47.